

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam indikator ekonomi makro terdapat tiga hal utama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi dalam suatu negara, antara lain yakni Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Pengangguran. Dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat, jika angka pertumbuhan positif dapat dikatakan bahwa perekonomian negara yang berkaitan cukup baik, namun sebaliknya jika angka pertumbuhan ekonomi negatif maka perekonomian negara yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak cukup baik. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan selalu memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan ekonomi biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi suatu negara dapat terpecahkan (Todaro, 2013).

Pengangguran selalu menjadi masalah yang diperhatikan oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

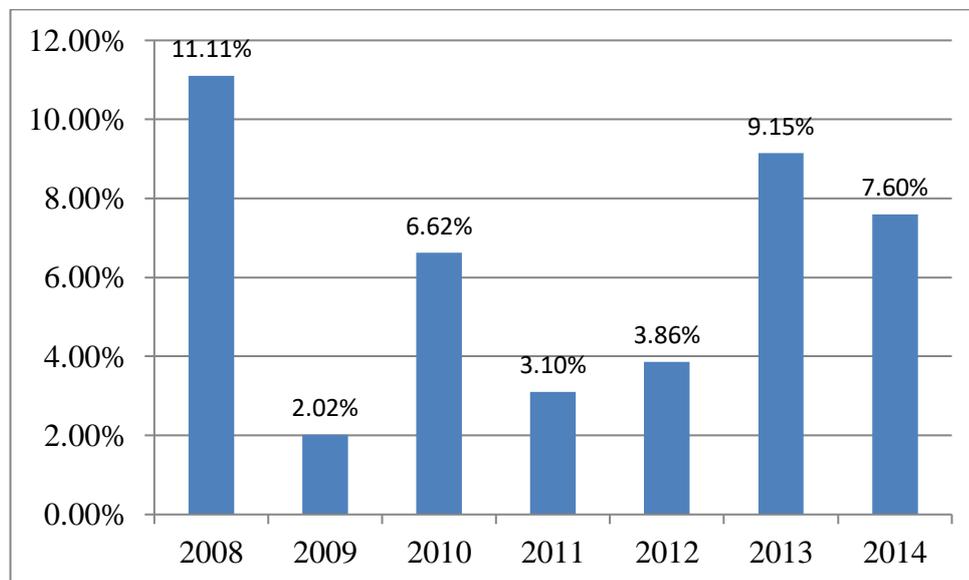
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prestasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (Sukirno, 2002:13). Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2000:123). Tingkat pengangguran hingga kini dipercaya saling berkorelasi dengan kenaikan harga secara umum (inflasi). Sedangkan kurva Phillips menjelaskan hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah dan begitu sebaliknya. Hubungan antara keduanya merupakan suatu persoalan pokok dan merupakan topik klasik dalam analisis makroekonomi. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Pada saat terjadinya kehancuran tersebut, kota New York sedang tumbuh menjadi ibukota finansial yang utama dan metropolis. Kehancuran tersebut terjadi setelah ledakan spekulatif yang terjadi pada periode tahun 1920an dimana jutaan warga Amerika melakukan investasi besar-besaran pada bursa saham, hingga menggunakan dana pinjaman

guna membeli saham yang berujung pada terjadinya depresi yang mengakibatkan menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929.

Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula (Amir, 2008). Sebagaimana yang diketahui pada saat depresi ekonomi melanda Amerika pada tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi disertai dengan pengangguran yang tinggi. Berdasarkan pada fakta itulah ahli ekonomi A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi perekonomian Inggris untuk periode 1861-1957. Dari hasil pengamatan tersebut terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut dengan korelasi yang cukup kuat. Jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah, demikian pula sebaliknya. Hasil pengamatan ini disebut Kurva Phillips. *Trade-off* antara inflasi dan pengangguran merupakan prinsip dasar ekonomi (Mankiw, 2003). Jika berdasar pada pernyataan tersebut, penciptaan kesempatan kerja dan kestabilan harga tidak dapat terjadi bersama-sama. Jika pemerintah menghendaki kestabilan harga, maka harus mau menanggung beban tingkat pengangguran yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mau menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, maka konsekuensinya angka inflasi akan cenderung lebih tinggi. Kedua pilihan tersebut tentu saja sama-sama sulit untuk dilakukan. Padahal tingkat inflasi rendah bersama-sama dengan tingkat pengangguran yang juga rendah, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara dan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi (Ahmad, 2007).

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu (Nopirin, 1987:25). Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga barang umum mengalami kenaikan secara terus menerus (kontinu) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti besarnya permintaan barang (berlebihnya likuiditas/uang sebagai alat tukar), sementara itu produksi dan distribusi barang kurang (Nopirin, 2004). Dalam perekonomian inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan, menurunkan gairah menabung dan berinvestasi, menghambat usaha peningkatan ekspor, sehingga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial (Sukirno, 2008). Inflasi merupakan salah satu fundamental penting dalam masalah ekonomi yang bersifat kompleks. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran.

Inflasi di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Berikut Gambar 1.1 yang menunjukkan data inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018.



Gambar 1.1 Inflasi Provinsi Jawa Barat 2008-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

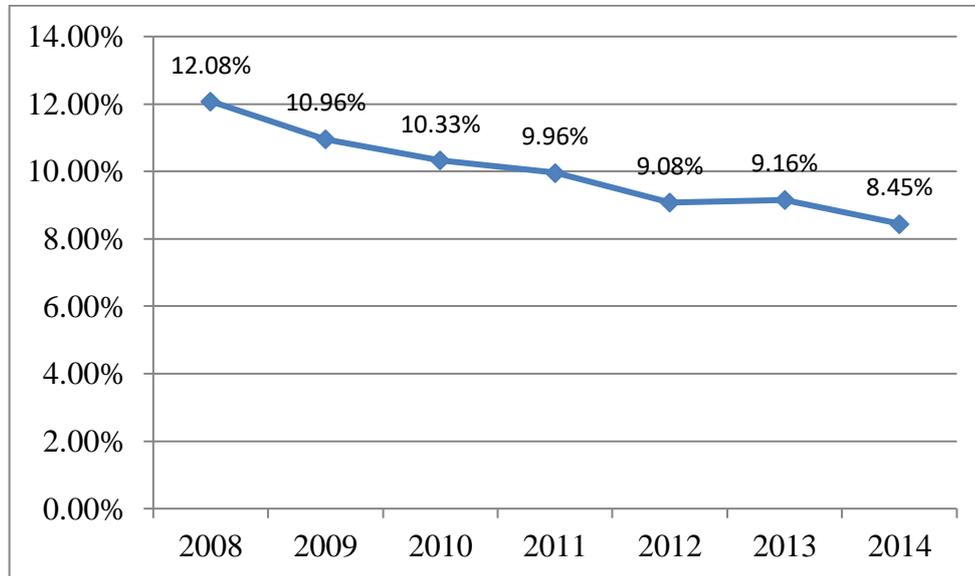
Dari gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa inflasi pada tahun 2008 merupakan tahun dimana inflasi tertinggi sebesar 11.11 persen. Hal ini dikarenakan pengaruh dari gejolak eksternal yaitu krisis dunia yang terjadi di Amerika Serikat. Inflasi 2009 sebesar 2,02 persen. Inflasi ini merupakan yang terendah. Terjaganya produksi pangan yang didukung kelancaran rantai distribusi menyebabkan fluktuasi harga sebagian besar komoditas sepanjang tahun relatif terkendali. Tahun 2013 merupakan tahun dimana inflasi tertinggi setelah tahun 2008 dengan inflasi sebesar 9.15 persen dikarenakan kenaikan BBM di Indonesia..

Permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa, serta output juga bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan permintaan agregat harus pula diimbangi dengan peningkatan penawaran agregat agar tidak

memicu kenaikan harga yang bisa berakibat pada kenaikan inflasi. Sedangkan harga disesuaikan untuk menjamin bahwa kuantitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan (Sukirno, 2004).

Menurut (Muharman dan Maski, 2013), turunnya output perusahaan membawa perusahaan ke dalam kerugian, sehingga untuk mengurangi beban biaya perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan dan selanjutnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu dalam makroekonomi, dimana setiap masyarakat di suatu negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, permintaan akan faktor-faktor produksi akan meningkat pula termasuk faktor produksi tenaga kerja. Dengan demikian, keadaan tersebut akan menciptakan kesempatan kerja (Sobita, 2014). Kesempatan kerja berkaitan dengan peluang para angkatan kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau dalam definisi lainnya, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan ataupun kebutuhan tenaga kerja. Kesempatan kerja biasanya tercipta sebagai dampak banyaknya kegiatan usaha yang berjalan, baik usaha yang dilakukan oleh pihak swasta, maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin rendah kesempatan kerja di suatu negara, maka semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tidak dapat bekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran besar-besaran di

sebuah negara. Berikut ini merupakan gambar grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2018:



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat 2008-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Gambar 1.2 menjelaskan tentang bagaimana gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2014. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan angkatan kerja otomatis juga akan ikut meningkat, sedangkan pada aspek penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun juga ikut meningkat dikarenakan lapangan pekerjaan juga semakin luas. Tercatat dari tahun 2008 sampai 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (TPT) Jawa Barat mengalami tren penurunan. Namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2013 mengalami peningkatan sekitar 0,08 persen dibandingkan Agustus 2012, yaitu dari 9,08 persen menjadi 9,16 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Jika ditinjau kembali data inflasi Provinsi Jawa Barat tahun 2008 menunjukkan inflasi sebesar 11.11 persen, sedangkan ditahun berikutnya yaitu 2009 sebesar 2.02 persen inflasi ini menunjukkan penurunan sebesar 9.9 persen. Jika inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, maka tingkat pengangguran di Jawa Barat pada tahun 2008-2009 harusnya mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya tingkat pengangguran di Jawa Barat pada tahun 2008-2009 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat sebesar 12.08 persen dan pada tahun 2009 sebesar 10.96 persen. Hal ini bertentangan dengan teori yang dijabarkan oleh Kurva Phillips bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif, dengan kata lain apabila tingkat inflasi menurun maka tingkat pengangguran akan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai hubungan diantara kedua masalah terkait dengan judul **“Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dan Pengangguran (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2018 Dengan Pendekatan Kurva Phillips)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara tingkat inflasi dengan pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018
2. Bagaimana kurva Phillips berlaku di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah terjadi kausalitas antara tingkat inflasi dengan pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018
2. Untuk menganalisis apakah kurva Phillips berlaku di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai pertimbangan dalam setiap perumusan kebijakan yang akan disusun dan di implementasikan guna mencapai tujuan perekonomian yang seimbang.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengetahuan khususnya mengenai inflasi dan pengangguran.
3. Meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, sehingga dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri serta untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi
4. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan penelitian yang tertarik membahas masalah ini.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti mendapatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) serta dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang didapatkan dari internet dan perpustakaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diperkirakan selama 5 bulan yaitu pada bulan September 2019 sampai Januari 2020. Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul sampai siding skripsi.